

Pengusaha Kerupuk Pasir Keluhkan Harga Tepung Naik

SIDOARJO (IM)- Pengusaha kerupuk pasir di Sidoarjo, Jawa Timur, mengeluh harga bahan baku tepung melambung tinggi, hingga mencapai Rp 300.000. Sebelumnya, harga tepung per 50 kg sekitar Rp 500.000, tetapi sekarang Rp 700.000 hingga Rp 800.000. Padahal, harga jual kerupuk tetap Rp 5.000 per bungkus.

Dengan kondisi tersebut, para pengusaha kerupuk pasir terus berusaha harus tetap bertahan di tengah harga tepung yang melambung. "Mau tidak mau kita harus tetap bertahan semampunya, bagaimana caranya harus pinter-pinter berkreasi. Nantinya sangat luar biasa," ungkap pengusaha kerupuk pasir, Abdul Ghofar (40), pemilik UD Berkah Makmur Desa Bangsri Sukodono, Sidoarjo, Kamis (15/2).

Bahan baku lainnya, seperti bawang merah, bawang putih dan yang lainnya juga mengalami kenaikan harganya. Kalau dinaikkan harga jualnya, kasihan distributornya. "Belum lagi nanti sampai harga jual di konsumen. Saya kalau beli tepung sekitar 1 ton, itu pun tidak sampai satu bulan sudah habis. Makanya kalau harga tepung melambung itu sangat terasa sekali," ungkapnya.

Ia menguraikan harus pintar membuat kalkulasi, mulai dari harga tepung, distribusi, gaji karyawan sebanyak 15 orang. Abdul Ghofar yang sudah berwirusaha kerupuk pasir sejak 2017 berharap pemerintah memberi perhatian lebih kepada produsen kerupuk. "Bagaimana

caranya agar harga bahan pokok, dalam hal ini adalah tepung itu naiknya tidak terlalu tinggi. Saya sangat berharap pada pemerintah bisa memberikan solusi kepada pengusaha kerupuk pasir bila mengalami kondisi tersebut," harapnya.

"Saya kalau beli tepung sekitar 1 ton, itu pun tidak sampai satu bulan sudah habis. Makanya kalau harga tepung melambung itu sangat terasa sekali," ungkapnya.

"Untuk mendongkrak penjualannya kita harus ke luar kota. Kalau di dalam Kota Sidoarjo sendiri masih kurang maksimal. Kita kirim ke luar kota sampai 50 bungkus. Terjauh sampai kirim ke wilayah Yogyakarta. Bukan saja inovasi dalam distribusi, kami juga harus pintar-pintar menjaga kualitasnya," jelasnya Abdul Ghofur.

Ia menguraikan harus pintar membuat kalkulasi, mulai dari harga tepung, distribusi, gaji karyawan sebanyak 15 orang. Abdul Ghofar yang sudah berwirusaha kerupuk pasir sejak 2017 berharap pemerintah memberi perhatian lebih kepada produsen kerupuk. "Bagaimana

"Apalagi musim hujan sekarang ini permintaan tinggi, tetapi mengalami kesulitan dalam pengiriman. Namun, sebaliknya jika waktu kemarau proses pengeringan gampang, tetapi permintaan menurun," kata Abdul Ghofur. ● **pra**

IDN/ANTARA



BULOG PASOK BERAS KE PASAR UNTUK STABILKAN HARGA

Pekerja mengangkut paket beras SPHP ukuran 5 kg untuk dikirim ke pasar-pasar, di Serang, Banten, Kamis (15/2). Mendag Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah menginstruksikan Perum Bulog untuk menggenjot pasokan beras paket SPHP seharga Rp10.900 per kg ke pasar guna menstabilkan harga beras.

Surat Suara DPRD Kab. Bogor Tertukar, Sejumlah Parpol Tuding KPU Lalai

BOGOR (IM)- Sejumlah partai politik (parpol) mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena surat suara DPRD tingkat Kabupaten Bogor tertukar. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Bogor seburuk tertukarnya surat suara DPRD antara Daerah Pemilihan (Dapil) tidak lepas dari kelalaian KPU.

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan menyebut, tertukarnya surat suara DPRD Kabupaten antara Dapil 2 dan Dapil 3 Kabupaten Bogor ini merupakan kelalaian KPU dalam mendistribusikan logistik Pemilu 2024. "Kalo saya sebagai peserta (menganggap) itu kelalaian dari panitia KPU, PPK yang tidak teliti, sedangkan (Pemilu) ini berurusan dengan hajat orang banyak jangan sampai kelalaian kecil satu TPS akan berdampak kepada

kepercayaan kita," ucap Iwan, Kamis (15/2).

Dia pun menyangkan hal ini terjadi di Kabupaten Bogor, karena tertukarnya surat suara ini tidak terjadi di antar desa, melainkan antar kecamatan atau Dapil. "Itu juga saya menyangkan sampai ketuker jauh, kalo ketuker desa mending ya inikan beda kecamatan," paparnya.

Tertukarnya surat suara Calon Legislatif ini juga disebut akan merugikan semua partai dan peserta pemilu. "Semua partai juga rugi, karena mungkin masyarakat sudah datang, harus nunggu (pemilihan ulang) mungkin nanti tingkat kehadiran akan turun," ujarnya.

Senada dengan Iwan, Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza pun turut menyesalkan tertukarnya surat suara DPRD tingkat Kabupaten Bogor bisa tertukar. "Kami tentu sangat menyesalkan kejadian seperti ini, karena akan menambah waktu dan beban penyelenggara dan juga masyarakat setempat," ucapnya.

Dedi pun menyebut, terkait tertukarnya surat suara itu, pihaknya telah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bogor, agar menjadi perhatian lebih.

"Kita sudah sampaikan ke KPU agar menjadi perhatian untuk tindak lanjut segera sesuai dengan Peraturan yang ada," tegasnya.

Menurut Dedi, tertukarnya surat suara ini berdampak pada ditundanya proses pemungutan suara DPRD tingkat Kabupaten, sehingga bisa merugikan KPU dan Caleg. "Bisa jadi merugikan Parpol dan caleg, karena masyarakat bisa berubah dalam proses pemungutan suara tersebut," pungkasnya. ● **gio**

8 | Nusantara



PENGUMPULAN KEMBALI LOGISTIK PEMILU 2024 DI BOGOR

Petugas mengumpulkan kembali logistik Pemilu 2024 di gudang pendistribusian logistik PPK Ciomas, Bogor, Jabar, Kamis (15/2). Pengumpulan kembali logistik Pemilu 2024 hasil pemungutan suara tersebut dilakukan dari tingkat PPS ke tingkat PPK di wilayah Kab. Bogor yang memiliki jumlah DPT terbanyak di Jabar yaitu 3.889.441 pemilih.

DORONG KAUM MUDA DUKUNG KETAHANAN PANGAN

Kota Bandung Bakal Terapkan Program Urban Futures Bersama 10 Kota Dunia

Alasan Kota Bandung terpilih menjalankan program urban futures itu lantaran dianggap sudah mampu mengembangkan konsep ketahanan pangan salah satunya melalui Buruan Sae, kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar.

BANDUNG (IM)- Kota Bandung terpilih menjadi salah satu kota di dunia yang menjalankan program urban futures. Program untuk ketahanan pangan itu memadukan sistem pangan perkotaan, partisipasi kaum muda, dan aksi iklim.

Di Indonesia, program urban futures diimplementasikan di Kota Bandung (Jawa Barat) bersama Manggarai Barat (Nusa Tenggara Timur). Masing-masing kota dipilih karena kontribusinya yang unik terhadap gerakan orang muda Indonesia dan sistem

ketahanan pangan yang lebih luas di Indonesia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar mengatakan, alasan Kota Bandung terpilih menjalankan program urban futures itu lantaran dianggap sudah mampu mengembangkan konsep ketahanan pangan salah satunya melalui Buruan Sae.

"Buruan Sae sudah menjadi perhatian dunia. Kita sudah terlibat dalam fact dan Bandung menjadi anggota aktif, makanya Bandung menjadi daerah

percontohan program urban futures," kata Gin Gin Ginanjar, Kamis (15/2).

Selain itu, Kota Bandung telah menjadi anggota aktif dari pakta milan untuk kebijakan pangan perkotaan (milan urban food policy pact) dan memperbaiki sistem pangannya. Kota Bandung telah menciptakan platform multi-pemangku kepentingan dan menyusun rencana aksi pangan dan gizi.

Kota Bandung berencana untuk memperluas pertanian perkotaan, memperkuat kapasitas penyimpanan, mempromosikan inisiatif makanan sehat, dan mengatasi masalah sampah makanan.

Ia menambahkan, program ini berfokus pada pengembangan urban future dengan merencanakan konsep sebuah kota mengembangkan ketahanan pangan yang melibatkan banyak stakeholder.

Kita mendapatkan bantuan untuk pendampingan sampai 2027. Sekarang

kita tinggal merencanakan untuk kickoff penyelenggaraan bantuan," ucapnya.

Bantuannya, kata dia berupa pendampingan, capacity building, menyusun bersama secara kolaboratif tentang perencanaan pembangunan kota khususnya perencanaan kota dan kajian serta analisa kolaborasi berbagai stakeholder khususnya untuk kelompok muda," ujar dia.

Program urban futures adalah program global berdurasi lima tahun (2023-2027) yang memadukan sistem pangan perkotaan, partisipasi kaum muda yang bermakna, dan aksi iklim.

Program ini didanai Fondation Botnar dan dikelola Hivos, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis), RUAF Global Partnership on Sustainable Urban Agriculture and Food Systems (RUAF-CIC), serta mitra, jejaring, dan pakar lokal. Program urban futures

akan beroperasi di 10 kota di Kolombia (Cali dan Medellin), Ekuador (Manabi dan Quito), Indonesia (Bandung dan Manggarai Barat), Zambia (Chongwe dan Kitwe), dan Zimbabwe (Bulawayo dan Mutare).

Program urban futures akan berfokus pada tiga tujuan utama, yakni:

1. Mempengaruhi dan mendukung pengembangan dan implementasi kebijakan pangan perkotaan yang transformatif melalui forum multi-pemangku kepentingan dan gerakan orang muda.

2. Membentuk narasi baru yang menata ulang kota yang inklusif dan berketahanan iklim sehingga menginspirasi perubahan perilaku dan pola konsumsi.

3. Memungkinkan wirausaha muda di bidang pangan berkelanjutan untuk berkembang dan meningkatkan aliran keuangan ke kota-kota yang inklusif dan berketahanan iklim. ● **pra**

Ketua DPRD Desak Pemprov Jabar Tambah SMA Baru di Kota Bandung

BANDUNG (IM)- Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menambah jumlah SMA negeri di Kota Bandung. "Karena SMA merupakan kewenangan pemerintah provinsi, jadi kami meminta provinsi untuk pengadaan ruang kelas baru," kata Tedy Rusmawan, Kamis (15/2).

Menurut ia, apabila melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Kota Bandung saat ini. Idealnya, Kota Bandung memiliki satu sekolah SMA negeri di setiap kecamatan.

Saat ini, di Kota Bandung baru ada 27 SMA negeri dan itu pun tidak menyebar merata di tiap ke-

camatan. "Di tengah kota, ada beberapa SMA di satu kecamatan. Di wilayah lain malah belum ada sekolah sama sekali," ucapnya.

Berdasarkan data BPS, ada 12 kecamatan yang masih belum memiliki SMA negeri di Kota Bandung. Di antaranya adalah Panyileukan, Cinambo, Mandalajati, Astanaanyar, Bandung Kulon, Bandung Kidul, Bojongloja Kidul, Batununggal, Arcamanik, Cibeunying Kaler, Cidadad dan Sukajadi.

Di sisi lain, lanjut Tedy, pihaknya mendapatkan informasi bahwa pemerintah provinsi akan secara bertahap memenuhi kebutuhan pengadaan SMA. "Datanya ada 128 kecamatan yang belum memiliki SMA negeri di Jawa Barat," ujar dia. Namun, ia men-

gaku ragu dengan data tersebut, apakah Kota Bandung juga termasuk di dalamnya.

"Saya minta lihat secara objektif, karena di Kota Bandung saja masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki SMA Negeri dan data yang ada cukup banyak," ucapnya.

Lantaran itu dikemukakan Tedy, DPRD Kota Bandung mengusulkan ke pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar untuk bisa juga memperhatikan Kota Bandung. Mengingat jumlah Kota Bandung pun cukup banyak mencapai 2,5 juta. "Meski urusan kita SMP, tapi ke DPRD Kota Bandung banyak keluhan masyarakat yang masuk salah satunya saat reses, bahwa jumlah SMA negeri itu sangat terbatas," ujar dia. ● **pra**



PEMERIKSAAN RUTIN KESEHATAN IMIGRAN ROHINGYA DI ACEH

Tim medis Rumah Sakit Prince Nayef Universitas Syiah Kuala (USK) memeriksa kesehatan imigran etnis Rohingya di penampungan sementara, Gedung Meuseuraya, Banda Aceh, Kamis (15/2). Menurut tim medis, sebanyak 127 orang imigran etnis Rohingya yang masih menempati penampungan sementara tersebut menjalani pemeriksaan karena sebagian besar di antaranya menderita penyakit kulit, batuk dan demam.

IDN/ANTARA

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada khalayak ramai sehubungan dengan rencana akan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan atau pengambilan keputusan oleh para pemegang saham perseroan terbatas PT ANDALAS BATUAH PERSADA, berkedudukan di Kota Bogor (Untuk selanjutnya disebut "Perseroan") berkenaan dengan rencana pengambilalihan saham di dalam perseroan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 UU Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, maka bagi setiap pihak yang memerlukan informasi atau keberatan dapat memperoleh informasi atau mengajukan keberatannya secara tertulis dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke alamat :

PT ANDALAS BATUAH PERSADA
Ruko Deka Farma Lt. Basement,
Jln Raya Tajur No. 162 K,
Kel. Pakuan,
Kec. Bogor Selatan,
Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Direksi Perseroan